**REPRESENTASI POLITIK LOKAL ACEH
DALAM NOVEL *TANAH SURGA MERAH* KARYA ARAFAT NUR**
*The Representation of Acehnes Local Politic
in the Tanah Surga Merah Novel by Arafat Nur*

Syahrotul Latifah^a, Sugiarti^b

^{a b}Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Telepon/HP, 081230644882 Pos-el: syahrotull@gmail.com

(Diterima: 22 Agustus 2019, disetujui: 14 Januari 2020)

Abstract

Aceh's local politics raised the background in the novel Tanah Langit Merah by Arafat Nur. The purpose of this study is to represent the facts of Aceh's local politics in the novel Tanah Surga Merah. This study uses a sociological approach to literature. The type of research used is qualitative research using descriptive analysis. The source of the research data is the novel Tanah Langit Merah by Arafat Nur. The data in the study are dialogue quotations, monologues, and narratives in novels that reveal the facts of Aceh's local politics. Data analysis techniques were carried out in stages in accordance with Miles and Huberman with steps containing: (1) data reduction; (2) data intoxication of presentation; (3) listen to conclusions and verify data. The results of the study consisted of the facts of Aceh's local politics in the novel Tanah Langit Merah by Arafat Nur found the dominance of political parties, the strategy of egoism of political parties, and the make the money for everything.

Keywords: *local politics, political facts, Partai Merah, Aceh*

Abstrak

Politik lokal Aceh diangkat sebagai latar belakang dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Tujuan dalam penelitian yaitu merepresentasikan fakta-fakta politik lokal Aceh dalam novel *Tanah Surga Merah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data penelitian yaitu novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Data dalam penelitian yaitu kutipan dialog, monolog, dan narasi dalam novel yang mengungkap fakta-fakta politik lokal Aceh. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap menurut Miles dan Huberman dengan langkah-langkah meliputi: (1) tahap reduksi data; (2) tahap penyajian data; (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian berupa fakta-fakta politik lokal Aceh dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur ditemukan adanya dominasi partai politik, siasat egoisme partai politik, dan menuhkan uang.

Kata Kunci: *politik lokal, fakta politik, Partai Merah, Aceh*

1. Pendahuluan

Novel merupakan sebuah hasil kombinasi antara imajinasi dengan realita yang terjadi dalam masyarakat (Sugiarti, 2017). Hasil kombinasi kedua hal tersebut menimbulkan estetika dalam sebuah novel yang menjadi poin apresiasi oleh pembaca. Menurut Taine (dalam Anwar, 2015), novel secara analog adalah sebuah cermin kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Cermin tersebut cocok untuk merefleksikan segala aspek kehidupan. Salah satu novel yang menarik untuk diteliti berdasarkan topik representasi politik lokal adalah novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Novel ini dibangun dengan gejolak politik lokal di Kota Aceh sebagai pokok cerita. Penggambaran politik lokal disertai dengan kebiasaan masyarakat Aceh menunjukkan jalinan cerita yang dibangun. Kebiasaan yang digambarkan dalam novel sesuai dengan masyarakat Aceh sebagai daerah otonom yang memiliki kekuasaan tersendiri dengan berpegang teguh pada nilai keislaman. Di balik nilai keislaman yang digunakan sebagai tombak pendirian kekuasaan pemerintah, terdapat banyak fakta-fakta politik yang dilakukan oleh penguasa Aceh ketika akan dilaksanakannya pemilihan umum dewan.

Organisasi yang banyak berkembang di Indonesia tidak lepas dari faktor partai politik. Partai politik merupakan salah satu ajang untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi sebagai pengembang adanya partisipasi masyarakat untuk menentukan seorang penguasa yang akan memimpin suatu wilayah. Menurut Sukaharja (dalam Haniya, 2017) demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan makna sesungguhnya. Hal itu disebabkan partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.

Sistem perpolitikan yang dijalankan di setiap daerah memiliki aturan dan ikatan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sejarah pembentukan dan kebudayaan masing-masing daerah. Politik lokal yang dideskripsikan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur menceritakan

suatu gejolak partai politik untuk memenangkan sebuah pemilihan umum dewan yang akan segera dilaksanakan. Seperti tulisan Sugiarti (2015) yang menyatakan bahwa manusia sebagai individu menjadi pusat gagasan dalam terciptanya perubahan dan kebudayaan. Gagasan perubahan sosial dan historis dapat ditekankan pada suprastruktur dan ideologi.

Tanah Aceh merupakan sebuah provinsi yang diliputi banyak konflik. Sebagian besar masyarakat Aceh ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan gerakan yang sejalan dengan tujuan mereka, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut (Hamid, 2013) pada tanggal 4 Desember 1976 munculnya gerakan ideonasionalisme Aceh Merdeka, atau *Atjeh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF)* yang lebih dikenal dengan GAM, menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia. Gerakan itu dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad Tiro. Cita-cita gerakan ini adalah mendirikan Negara atau Kerajaan Aceh Sumatera. Arus utama ideologi yang dipakai merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda atau sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Berdasarkan spekulasi tersebut, rakyat Aceh mendirikan suatu organisasi untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan GAM menjadi ancaman atas terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menghindari dan menengahi upaya Aceh melepaskan diri dari NKRI, diadakanlah nota kesepahaman antara GAM dan pemerintah pusat yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding Helsinki* yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 (Feisal dan Mujibussalim, 2017). Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Aceh diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai hak otonomi yang disepakati.

Tidak semua provinsi di Indonesia memiliki hak otonom untuk menjalankan sistem politiknya. Hak otonom ini diberikan kepada provinsi yang memiliki keistimewaan karena spesifikalitas perjuangannya. Provinsi Aceh dengan keistimewaannya pun berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penamaan itu menurut Feisal dan Mujibussalim (2017) adalah karena adanya bentuk rekonsiliasi bermartabat menuju pembangunan sosial ekonomi dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Selain itu, dilandasi pula oleh pemulihan kembali kehidupan masyarakat menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat dari keterpurukan yang dialami Aceh selama 32 tahun berkonflik ditambah dengan bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004.

Sebagai upaya untuk merepresentasikan fakta-fakta politik lokal yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah*, digunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut (Faruk, 2015) merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagaimana yang ditemukan dan dialami secara langsung dalam kenyataan keseharian kehidupan. Wilayah kajian sosiologi yaitu menyangkut masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya, termasuk dalam tataran sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu lingkup kajian pendekatan sosiologi sastra menurut (Damono, 2014), yaitu: (1) konteks sosial pengarang; (2) sastra sebagai cermin masyarakat; dan (3) fungsi sosial sastra. Berdasarkan ketiga hal tersebut yang paling menjadi perhatian adalah: (a) sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakatnya; (b) sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja; dan (c) sejauh mana terjadi hubungan sintesis antara perombak masyarakat dan sebagai penghibur.

Teori politik lokal Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 (dalam Bahrum, 2016) tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI Partai Politik Lokal Bagian Pertama Pembentukan Pasal 75 poin (1) menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada

poin (4) dijelaskan pula bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh. Selain itu, pasal 76 pada poin (2) menjelaskan bahwa pengesahan partai politik lokal akan diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 dalam UU RI tahun 2014 (Bahrum, 2016) tentang partai politik lokal bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, gubernur dan atau wakil gubernur, bupati dan atau wakil bupati, serta walikota dan atau wakil walikota. Partai lokal menurut Feisal dan Mujibussalim, (2017) didirikan sebagai suatu organisasi politik atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan. Partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah atau masyarakat lokal.

Penelitian tentang perpolitikan Aceh pernah dilakukan antara lain oleh Feisal dan Mujibussalim (2017) dengan judul “Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh (Suatu Kajian terhadap Partai Daulat Aceh pada Tahun 2009)”. Feisal dan Mujibussalim menjelaskan bahwa adanya kesepakatan antara GAM dan RI menunjuk adanya tatanan baru pada perpolitikan di Aceh. Salah satu tatanan yang disetujui yaitu diperbolehkannya Aceh mendirikan partai politiknya sendiri. Salah satu partai yang didirikan oleh ulama, santri dayah, dan tokoh masyarakat yaitu Partai Daulat Aceh (PDA) pada tahun 2009. Fokus penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA. Pada dasarnya di Aceh terdapat adanya dominasi partai oleh PDA yang dipimpin oleh Tengku Dayah. Tengku Dayah menjadi tombak utama dalam mengambil simpati masyarakat karena Beliau pemimpin yang kharismatik dan fanatik terhadap nilai-nilai Islam sehingga

dengan mudah masyarakat Aceh menjatuhkan pilihan untuk memilih PDA. Faktor identitas Aceh yang dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekah menjadi penyebab utamanya. Eksistensi partai politik lokal yang berkembang di Aceh dapat dikatakan sangat berkembang pesat, akan tetapi banyak juga terdapat partai politik lokal yang hanya masih sekadar memanfaatkan kondisi untuk memenangkan pemilihan dewan di Kota Aceh.

Penelitian juga dilakukan oleh Bahrum (2016) dengan judul “Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syariat Islam)”. Bahrum menjelaskan bahwa munculnya dinamika politik lokal berawal dari munculnya gerakan ideo-nasionalisme Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Gerakan tersebut menyuarakan keinginan untuk mendirikan negara sendiri dan melepaskan diri dari NKRI. Pada tahun 1989 GAM mulai terprovokasi kembali pada era Orde Baru untuk memenangkan Partai Golkar. Tokoh lokal beserta TNI/Polri yang ada di Kota Aceh tersulut untuk menggerakkan Aceh merdeka kembali. Rakyat Aceh menginginkan keadilan dalam taraf ekonomi dan sosial yang belum didapatkan pada saat itu. Setelah Pemilu pada 7 Juni 1999, di Aceh masih terdapat kekerasan dan kebebasan ekonomi masih belum merata. Perkumpulan ulama di Aceh menggemakan untuk segera memberikan referendum atau Aceh merdeka. Pada saat itu warga Aceh banyak yang menjadi korban dalam penumpasan GAM. Pada tanggal 15 Agustus 2005 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan ketua GAM dalam penandatanganan *MoU Helsinki*. Salah satu butir perjanjian yaitu Aceh berhak memiliki pemerintahan otonom yang sesuai dengan tata cara kedaerahan Aceh.

Penelitian juga dilakukan oleh Siti Ikramatoun dan Amin (2018) dengan judul “Konstelasi Politik Aceh Pasca-*MoU Helsinki* (2006--2015)”. Penelitian itu menjelaskan bahwa dampak positif perpolitikan Aceh mulai menemui titik terang pascatsunami Aceh pada

tahun 2004. Implementasi *Mou Helsinki* yaitu pengesahan UU penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 Agustus 2006. Dengan diberlakukannya UUPA (Undang-Undang pemerintahan Aceh), anggota GAM yang menyuarakan referendum menjadi melebur bersama masyarakat untuk mendirikan partai politik lokal. Partai politik lokal Aceh yang dikenal yaitu PA (Partai Aceh). Dalam pemilu legislatif Aceh dalam penentuan anggota DPR pada tahun 2014, PA menjadi partai yang memenangkan pemilu. PA juga tidak kalah dengan partai nasional yang telah ada. PA menjadi tombak perpolitikan Aceh menjadi lebih modern, tapi tetap dengan memperjuangkan syariat Islam yang berlaku. Konstelasi pasca-*MoU Helsinki* menggambarkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap partai lokal yang berdiri di Aceh. Masyarakat Aceh tidak banyak yang percaya dengan partai nasional yang berkedudukan di Jakarta. PA menjadi partai primadona di Aceh karena faktor pro rakyat Aceh dengan pendekatan keacehan.

Salah satu bentuk fakta perpolitikan lokal Aceh dalam novel *Tanah Surga Merah* yaitu berkuasanya Partai Merah sebagai partai yang mendominasi roda perpolitikan di Aceh, khususnya di Kota Lamholk sebagai latar tempat cerita dalam novel. Fakta-fakta politik lokal digunakan sebagai ajang untuk menjalankan sistem demokrasi sesuai dengan hak otonom yang telah diberikan pemerintah RI kepada Provinsi Aceh yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Realita buruk dalam perpolitikan yang ada di Kota Aceh menyebabkan banyak permasalahan terkait fakta-fakta politik Partai Merah untuk memenangkan suara rakyat Aceh yang diterapkan dengan pelaksanaan politik jauh dari kata manusiawi karena dilaksanakan dengan sistem pemaksaan dan ancaman.

Persoalan politik lokal dikemas oleh Arafat Nur dengan mengkaji dan merekam secara kritis fenomena beserta realita masyarakat Aceh berupa tatanan politik yang dibangun sesuai hak

otonom yang dimiliki Provinsi Aceh. Gejolak politik lokal menjadi fondasi yang direkam oleh pengarang untuk menggambarkan secara jelas kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh dalam praktik perpolitikan. Melihat realitas politik lokal yang dituangkan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur, maka permasalahan yang akan diteliti mencakup fakta-fakta politik lokal di Kota Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah yang lebih menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis bagi pemantapan makna sebagai simpulan penelitian. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta politik lokal Aceh dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan sosiologi sastra dengan teori politik lokal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Politik Lokal di Kota Aceh. Sumber data penelitian ini adalah novel *Tanah Surga Merah*. Data dalam penelitian berupa kutipan dialog dan narasi dalam novel *Tanah Surga Merah* tentang fakta-fakta politik lokal Aceh. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap berdasarkan teknik analisis model alir Miles dan Huberman (dalam Mujianto, 2019) dengan langkah-langkah meliputi: (1) tahap reduksi data yaitu dengan mengerucutkan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian; (2) tahap penyajian data yaitu penyajian data dan siap untuk dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif; (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu bagian dari konfigurasi yang utuh, penarikan kesimpulan juga langsung diverifikasi selama penelitian.

2. Hasil dan Pembahasan

Sistem politik di Indonesia mengedepankan sistem demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan juga menjalankan aspirasi masyarakat dengan wadah berupa pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan

untuk memperoleh pemimpin dalam mengatur suatu tatanan wilayah. Partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan hal tersebut berikut fakta-fakta dan strategi politik berdasarkan tata aturan politik lokal Aceh.

2.1 Fakta-fakta Politik Lokal Aceh dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang politik lokal Aceh ditegaskan bahwa Aceh telah memiliki hak otonom untuk mendirikan sebuah sistem perpolitikan sendiri yang tetap disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian hak otonom tersebut oleh pemerintah pusat pada Provinsi Aceh dimanfaatkan oleh penduduk Aceh untuk mendirikan suatu partai politik lokal yang disesuaikan dengan kebudayaan dan tatanan sosial yang ada di masyarakat Aceh.

“Suardin menjadi wali kota atas dukungan penuh Partai Merah yang selalu menenangkan pemilihan umum setelah pemberontakan berdamai dengan pemerintah. Orang-orang Suardin dan orang-orang Partai Merah, selain menduduki semua jabatan penting di pemerintahan daerah, mereka juga ada di mana-mana seperti hama walang sangit mengerubungi tanaman padi yang sedang berbuah. Itulah sebabnya aku terpaksa melarikan diri sejauh-jauhnya dari tanah yang kucintai ini” (Nur, 2016:13).

Berdasarkan kutipan tersebut, fakta politik yang nampak yaitu Suardin dapat menjadi Wali Kota Lamholk Aceh karena dukungan Partai Merah, yaitu partai yang berkuasa di wilayah Aceh. Partai ini menjadi partai dominan yang anggotanya hampir semua berada di kursi dewan. Hal tersebut menandakan bahwa fakta politik lokal di Aceh terpaku pada satu partai

besar yang mendominasi di wilayah tersebut. Dominasi partai merupakan hal yang lumrah terjadi di Aceh. Dominasi partai muncul disebabkan adanya latar belakang Aceh sebagai kota konflik yang memiliki gerakan, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini telah mendirikan sebuah partai yang dijuluki Partai Merah. Seperti terlihat dalam kutipan, Partai Merah berhasil menduduki hampir semua kursi jabatan dewan yang ada di Kota Aceh.

“Bagaimanapun juga *Partai Merah sangat berkuasa saat ini dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok*. Partai terkaya, dan orang-orangnya menduduki jabatan penting di pemerintahan; apa yang bisa dilakukan partai lain? Mereka menguasai dan mengendalikan kekuasaan begitu besar, tanpa memberikan ruang sedikitpun bagi partai lain untuk bergerak. Pengawasan pihak berwenang yang memantau agar pemilihan umum berlangsung jujur dan adil, sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya.” (Nur, 2016:136)

Berdasarkan kalimat *Partai Merah sangat berkuasa saat ini dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok* mengindikasikan bahwa dominasi partai masih menjadi fakta perpolitikan yang ada di Kota Aceh. Dijelaskan juga bahwa Partai Merah saat ini sangat berkuasa dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok daerah. Adanya dominasi partai menandakan bahwa masih ada kesenjangan sosial yang terjadi. Terlihat pula dalam kutipan bahwa dalam Partai Merah terdapat orang-orang kaya dan mendapat jabatan penting dalam pemerintahan.

Partai-partai yang mengikuti pemilihan umum pastinya memiliki tujuan untuk menduduki kursi dewan dengan anggota sebanyak-banyaknya. Hasil pemilihan ini berdasarkan pada voting masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh sebab itu, setiap partai,

memiliki siasat dan strategi tersendiri untuk memperoleh jabatan di kursi dewan. Hal itu terlihat pada kutipan berikut.

“Namun, negeriku ini sudah *dirusak tangan-tangan penjajah dan pemimpin bodoh* sehingga bagaimanapun petani bekerja keras, mereka tak akan pernah bisa hidup makmur. Para pengendali kekuasaan terus mengusik rakyat, membuat rusuh demi siasat dan intrik politik tak ada suatu upaya pun yang dilakukan pemerintah demi kemakmuran rakyat, semuanya demi kepentingan mereka” (Nur, 2016:123).

Kalimat dirusak tangan-tangan penjajah dan pemimpin bodoh adalah gejala perpolitikan. Kota Aceh ternyata sebenarnya meniru adanya perpolitikan yang telah ditunjukkan oleh penjajah. Penjajah yang pernah singgah di Indonesia hanya memanfaatkan tenaga dan potensi alam yang dimiliki Negara Indonesia semata-mata hanya untuk kemakmuran mereka. Sistem yang demikian rupanya juga menjadi sistem perpolitikan di Kota Aceh yang melakukan siasat dan taktik hanya untuk kepentingan partai saja, tidak pernah mengatasmakan kepentingan rakyat atau apapun. Fakta perpolitikan Aceh yang terlihat berdasarkan kutipan tersebut yaitu siasat egoisme partai dalam melaksanakan sistem perpolitikan. Sistem pada partai politik hanya melihat pada kepentingan diri dan golongan saja, tanpa melihat kepentingan sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Kesenjangan sosial juga nampak pada fakta ini, yaitu hanya orang-orang yang berada di pihak partai saja yang mendapat perlindungan dan kekuasaan, sedangkan yang lain tidak mendapatkan apa-apa.

“*Mereka hanya berani bersikeras dan menekan kaum sendiri*. Inilah bangsa hebat yang paling agung dan paling mulia di atas bumi” (Nur, 2016:35),

Dalam kutipan *mereka hanya berani bersikeras dan menekan kaum sendiri* terlihat bahwa orang-orang Partai Merah hanya berani dan menindas kaum sendiri. Partai Merah berlaku semena-mena terhadap warga Aceh. Fakta politik lokal berdasarkan kutipan adalah strategi egoisme Partai Merah yang menindas kaum sendiri, padahal secara nyata Partai Merah mengatakan bahwa Aceh merupakan daerah paling agung dan paling kuat karena berasaskan syariat Islam ketika dulu mula mendeklarasikan partai. Siasat yang dilakukan Partai Merah dengan menindas kaum sendiri, maksudnya adalah mengerahkan segala perbuatan, ancaman, gangguan, dan penindasan hanya untuk kepentingan kemajuan partai saja, tanpa melihat siasat yang dilakukan itu manusiawi atau tidak.

“Orang-orang yang dulu berteriak-teriak demi kemerdekaan, demi martabat, dan demi Aceh yang hebat, justru merekalah yang merusaknya. Kekuasaan di tangan mereka bukannya membuat Aceh semakin baik. Aceh masih jauh lebih bagus ketika masih berada di bawah pemerintahan sebelumnya, sekalipun dikuasai orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Jakarta” (Nur, 2016:51).

Orang-orang terdahulu yang serius memperjuangkan kemerdekaan Aceh terus mengatakan dan percaya bahwa Aceh nantinya akan menjadi wilayah yang hebat. Namun, orang-orang terdahulu yang pernah memerdekakan Aceh tersebut malah merusaknya. Kursi kekuasaan yang mereka duduki dan jabatan yang mereka pegang tidak membuahkan hasil apapun untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Masyarakat semakin merasa tertekan dan tertindas. Fakta perpolitikan dalam kutipan ini yaitu Orang-orang partai hanya bekerja sesuai dengan kepentingan partai saja, tanpa melihat kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seakan kepentingan yang ke sekian. Padahal, berhasilnya

kepemimpinan suatu wilayah dilihat dari kemakmuran masyarakatnya.

“Kami kerap bertemu di kedai kopi Lamholk, pastinya sebelum aku menembak mati Jumadil dan aku masih bergabung dengan Partai Merah yang terbentuk sesudah itu. Lama setelahnya, kami sudah mulai tidak sepaham dengan orang-orang Partai Merah yang melenceng dari garis perjuangan. Partai hanya dijadikan kendaraan untuk merebut kekuasaan, bukan memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. Terlebih lagi, banyak perilaku mereka yang tidak berakhlak dan sama sekali tidak punya adab” (Nur, 2016:134).

Murad sebagai seorang mantan anggota GAM memutuskan untuk keluar dalam keanggotaan Partai Merah karena orang-orang partai Merah yang sudah tidak lagi patuh pada tujuan awal pembentukan partai. Mereka melenceng dari garis perjuangan yang selama ini telah digagas dan diperjuangkan. Partai hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan hak rakyat. Fakta perpolitikan yang terdapat dalam kutipan tersebut yaitu siasat egoisme Partai Merah dalam melakukan segala cara hanya untuk kepentingan orang-orang partai saja, tanpa melihat dan memperjuangkan hak serta kepentingan rakyat. Disebutkan pula dalam kutipan, bahwa perilaku orang-orang Partai Merah yang tidak memiliki akhlak dan sama sekali tidak punya adab.

Pemilihan umum memang lumrah dilaksanakan pada negara yang memiliki sistem demokrasi dalam pelaksanaannya. Pada negara-negara maju, sebagian aturan pemerintahannya menggunakan sistem presidensial dengan sebuah partai yang menaunginya. Pada pemilihan ketua dewan, pemilihan dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sebagai ajang penyampaian aspirasinya.

“Tak ada yang bisa menduga arah politik sesat ini, bahwa lelaki yang sangat bebal itu bisa terpilih sebagai anggota dewan, bahkan anggota dewan memilihnya sebagai Ketua Dewan, dan sampai sekarang dia masih menduduki jabatan penting itu” (Nur, 2016:138).

Adanya pemilihan umum dalam menentukan ketua dewan memang telah dilaksanakan. Aspirasi rakyat secara gamblang juga telah disalurkan. Namun, di balik itu semua, dalam satu komplotan Partai Merah, sebelumnya telah ditentukan siapa yang akan menjadi ketua dewan sehingga seluruh anggota Partai Merah akan memberikan suara kepada calon yang terpilih dalam forum Partai Merah tersebut. Pemilihannya pun tanpa melihat kecakapan calon ketua dewan yang nantinya akan mengemban amanah untuk memimpin Kota Lamholk, Aceh. Orang-orang Partai Merah hanya berpikir bahwa seluruh jabatan yang ada di Aceh harus diduduki oleh orang-orang Partai Merah. Fakta perpolitikan Aceh yang tampak berdasarkan kutipan tersebut yaitu sistem pemilihan umum yang telah diatur sesuai dengan keuntungan yang ingin dicapai Partai Merah. Pemilihan umum yang dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja untuk cap bahwa daerah tersebut telah melaksanakan aspirasi rakyat. Hal tersebut telah diketahui umum bahwa pikiran ini berasal dari dominasi partai yang berkuasa pada saat itu.

“Dulu, aku begitu mendukung Partai Merah, tapi kecewa. Selama mereka duduk di pemerintahan, malah keadaan rakyat makin sengsara. Mereka itu orang-orang bodoh yang tidak bersekolah, dan tidak pernah mau belajar,” ucapnya dengan raut wajah kesal” (Nur, 2016:173).

Kalimat *“Selama mereka duduk di pemerintahan, malah keadaan rakyat makin sengsara”* menunjukkan bahwa dahulu banyak warga yang sangat mendukung Partai Merah karena berdasarkan asas

pembentukannya adalah menginginkan perjuangan rakyat Aceh untuk dihargai. Akan tetapi, kekuasaan telah membutakan mereka, para wakil dewan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki dan membuat rakyat semakin sengsara. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang harus dimiliki ketika menjadi pejabat wakil dewan. Banyak tata krama dan aturan-aturan yang harus diterapkan oleh wakil dewan, namun orang-orang Partai Merah adalah orang yang bodoh, mereka hanya menginginkan jabatan dan uang saja tanpa melihat seberapa besar pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Tuhan kelak atas apa yang mereka perbuat. Fakta perpolitikan yang terlihat dalam kutipan yaitu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Partai Merah dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Akibat dari hal itu sangat jelas. Rakyatlah yang menerima imbas yang paling besar karena pemerintahan sebenarnya tidak bisa bergerak, apabila tidak ada rakyat di dalamnya. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus diutamakan karena rakyatlah yang sebenarnya penggerak adanya pemerintahan dan wakil dewan yang duduk di pemerintahan sebagai wakil atau wali penyampaian aspirasi rakyat.

“Aku juga tidak yakin. Semua partai itu omong kosong. Apa pun yang mereka katakan sumpah-sumpah, membawa-bawa ayat Quran; tujuan utamanya hanyalah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Aku tidak yakin mereka berjuang untuk rakyat. Sampai kiamat pun aku tak bakal pernah bisa percaya!” (Nur, 2016:173)

Partai yang membawa-bawa nama ayat Quran sebagai tujuannya hanyalah omong kosong. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menarik simpati masyarakat agar Partai Merah dicap sebagai Partai Tuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan yang demikian hanya digunakan sebagai kepentingan golongan partai saja. Fakta perpolitikan yang terdapat dalam kutipan tersebut yaitu membawa nama Tuhan

dalam politik yang pelaksanaannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Tuhan. Nama Tuhan hanya digunakan Partai Merah sebagai penarik simpati saja untuk meyakinkan rakyat agar rakyat menancapkan paku pilihannya pada partai berwarna dasar merah tersebut.

“Aku mengangguk-angguk pelan, berpikir bahwa ada suara rusak yang berasal dari rumah ini pada pemilihan umum mendatang. *Penipuan yang berlarut-larut dilakukan pemerintah membuat rakyat sulit percaya.* Untuk menyelamatkan kertas suara agar memiliki satu lubang yang tepat, maka yang dibutuhkan adalah uang. Maka, partai terkayalah yang bakal menang!” (Nur, 2016:183)

Berdasarkan kalimat *Penipuan yang berlarut-larut dilakukan pemerintah membuat rakyat sulit percaya*, penipuan dan janji-janji yang sering dikatakan Partai merah untuk membuat rakyat percaya sepertinya sudah tidak berlaku lagi, saat ini yang dibutuhkan yaitu membeli suara. Uanglah yang berkuasa saat ini. Orang-orang Partai Merah mengatakan bahwa dengan memilih partai ini maka rakyat akan selamat karena menurut mereka Partai Merah adalah Partai Tuhan yang mengatasnamakan syariat Islam dan Quran sebagai landasan mereka. Namun, sebenarnya yang menjadi Tuhan mereka adalah uang karena mereka dapat membeli apapun dengan uang, bahkan nyawa sekalipun. Fakta perpolitikan yang ada dalam kutipan tersebut yaitu siasat penyelewengan mereka dengan menggunakan uang sebagai Tuhan bagi Partai Merah. Mereka melakukan segala cara dengan uang agar seluruh pemilihan umum dapat dimenangkan oleh partai Merah sehingga Partai Merah tetap berkuasa dan tetap menjadi partai dominan di Aceh.

3. Penutup

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta politik lokal dalam novel *Tanah Surga Merah* Karya Arafat Nur adalah adanya dominasi Partai

Merah; siasat egoisme partai politik; dan menuhankan uang dalam setiap alur yang diceritakan. Dengan ditemukan tiga fakta politik lokal yang ada dalam novel *Tanah Surga* mengindikasikan bahwa sistem perpolitikan di Aceh masih terpaku pada kekuasaan tunggal dari satu partai dominan, egoisme partai politik, serta menuhankan uang dengan tujuan kejayaan partai dan bukan atas dasar kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. (2015). *Teori Sosial Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bahrum, S. (2016). Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/>
- Damono, S. D. (2014). *Sosiologi Sastra, Pengantar Ringkas*. Jakarta: Editum.
- Faruk (2015). *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feisal, A., dan Mujibussalim (2017). Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh (Suatu Kajian terhadap Partai Daulat Aceh pada Tahun 2009). *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2 (2). Retrieved from www.jim.unsyiah.ac.id
- Hamid, A. (2013). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 1 (2), 32–45. <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.32--45>
- Haniya, S. (2017). Persepsi Tokoh Mahasiswa terhadap Partai Aceh (Studi Kasus Tokoh Mahasiswa Universitas Syiah Kuala) (Vol. 1, pp. 1–9). Vol. 1, pp. 1–9. Retrieved from <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2358/1165>
- Ikramatoun, S. dan Amin, K. (2018). Konstelasi Politik Aceh Pasca-MoU Helsinki (2006–2015). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12

- (1), 89–110. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/>
- Mujianto, G. (2019). Peningkatan Hasil Belajar Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi pada Peserta Didik Kelas X Sman 7 Malang dengan Model Pembelajaran Integratif. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 5 (1), 39. <https://doi.org/10.22219/jinop.v5i1.7244>
- Nur, A. (2016). *Tanah Surga Merah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiarti (2015). Politik Lokal dalam Novel *Jatisaba* Karya Ramayda Akmal. *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Pendidikan Karakter dan Industri Kreatif, Surakarta*, (ISBN: 978-602-361-004-4). Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>
- Sugiarti (2017). Kesadaran Ketuhanan Tokoh Utama dalam Kumpulan Cerpen *Ketika Mas Gagah Pergi dan Kembali* Karya Helvy Tiana Rosa. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2 (1), 90. <https://doi.org/10.22219/kembara.vol2.no1.90-97>
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.